

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, merata berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Peningkatan kemakmuran dan pemerataan memerlukan berbagai upaya, tidak hanya sekedar memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melainkan perlu adanya pendistribusian pendapatan yang merata. Kebijakan pemerintah tentang pembangunan nasional yang selama ini berorientasi kepada pertumbuhan, kurang mendukung tercapainya pemerataan. Bahkan menimbulkan semakin tingginya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Demikian juga kesenjangan antara wilayah, desa dan kota, pusat dan daerah, serta wilayah Indonesia bagian Barat dan wilayah Indonesia bagian Timur.

Pembangunan bidang ekonomi, tidak terlepas dari dunia industri, karena industri merupakan tulang punggung perekonomian bangsa, dimana industri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri menurut definisinya yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian adalah :

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi yang memiliki nilai yang lebih tinggi termasuk rekayasa dan rancang bangun. Definisi tersebut menggambarkan bahwa semua kerajinan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi merupakan bagian dari industri. Oleh sebab itu keberadaan industri khususnya industri kecil merupakan harapan dari seluruh lapisan masyarakat.

Industri tidak lepas dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah pengrajin kulit. Salah satu upaya peningkatan SDM adalah melalui pelatihan, karena pelatihan merupakan bagian dari sektor pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia. Selain itu pelatihan merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu industri kecil, menengah dan besar.

Menyimak berbagai fenomena tersebut kini pemerintah berupaya untuk mengubah kebijakan pembangunan dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan serta program-program pembangunan. Salah satu peraturan yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Berbagai program pembangunan, banyak yang berorientasi kepada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, pengembangan Koperasi serta sektor-sektor lainnya.

Dalam perjalanan sejarah pembangunan telah banyak program-program yang berorientasi kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah.

Misalnya pada Pelita I melalui Proyek Pembinaan Kerajinan Rakyat (PROBINKRA). Pelita II melalui Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BIPIK). Akhir Pelita II telah dikembangkan sarana-sarana pembinaan yang bersifat tetap berupa Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada sentra-sentra industri kecil, Pusat Pengembangan Industri Kecil (PPIK) dan Pusat Pelayanan Informasi (PPI) dan sebagainya.

Peningkatan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, kini terasa semakin dibutuhkan, apalagi dalam situasi krisis ekonomi dan moneter dimana banyak perusahaan besar yang bangkrut dan memberhentikan karyawan/buruhnya (PHK). Pengembangan sentra industri di wilayah pedesaan dapat menjadi solusi untuk menampung para pekerja yang terkena PHK. Untuk meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas, telah dilakukan berbagai kegiatan pendidikan dan latihan. Dalam pelaksanaan pendidikan nampak bahwa industri kecil merupakan suatu alternatif untuk menuju kemakmuran dan pemerataan pendapatan.

Pengembangan SDM melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan bagi pengrajin industri kecil merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dari para pengrajin dan pengusaha industri kecil untuk mengembangkan usahanya. Tanpa dukungan pendidikan dan latihan, industri kecil tidak akan berkembang, bahkan secara alamiah akan mundur dan akhirnya bangkrut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 pasal 3 menyatakan "Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan

kejuruan”. Selanjutnya “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”. Sedangkan pasal 5 menyatakan “penyelenggara pendidikan luar sekolah terdiri atas pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya”.

Berdasar kepada landasan tersebut, maka berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, pembinaan, bimbingan dan penyuluhan telah banyak dilakukan oleh pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. Melalui berbagai institusi yang ada pemerintah telah banyak berperan sebagai agen perubah (*change agent*), disamping lembaga swasta lainnya serta organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM). Diantara institusi tersebut adalah :

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan berbagai sponsor melalui proyek Lingkungan Industri Kecil (LIK),
2. Departemen Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Proyek-proyek Pengembangan Manajemen dan Produktivitas (BPMP),
3. Bank dengan layanan Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP),
4. Perguruan Tinggi dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM),
5. Perusahaan Swasta dan BUMN, serta berbagai LSM.

Peranan berbagai institusi tersebut mengandung tujuan yang sama yaitu meningkatkan motivasi, pengetahuan, keterampilan dan kesempatan dalam pengembangan kewirausahaan. Mulai dari soal teknik produksi sampai dengan teknik pemasaran termasuk berbagai bantuan dengan sistem “bapak angkat” dan “anak angkat” sudah direalisasikan dalam program tersebut. Demikian juga

kebutuhan akan adanya koperasi yang menampung pengrajin sudah banyak dibentuk di sentra-sentra industri kecil tersebut.

Berdasarkan data dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DEPPERINDAG), di Indonesia pada Pelita IV telah dilakukan upaya menumbuhkan tidak kurang dari 230.000 unit usaha. Diantaranya berupa pengembangan industri pedesaan di 2200 desa, serta dilakukan pembinaan secara intensif sebanyak 1000 sentra-sentra industri kecil. Jawa Barat sebagai salah satu propinsi yang memiliki banyak industri kecil dan menengah, dengan keragaman jenis komoditi diantaranya: kerajinan kulit, bordir, keramik hias, anyaman bambu/pandan, logam dan sebagainya.

Berdasarkan data tersebut pemerintah menaruh harapan besar terhadap kegiatan industri kecil dalam rangka meningkatkan perekonomian para pengrajin pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Garut pada umumnya. Pemerintah setempat melalui Dinas PERINDAG (Perindustrian dan Perdagangan) terus melakukan upaya pembinaan dan teknik produksi kepada berbagai sentra industri yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Sebagai pelaksana pembina teknis fungsional Dinas PERINDAG dalam pelaksanaannya sering mengalami banyak kendala yang meliputi kelembagaan, aparatur pembina, sinkronisasi dan koordinasi program, sarana dan prasarana usaha serta pemasaran. Banyak instansi yang telah melakukan pelatihan, pembinaan dalam rangka mengembangkan usaha, namun pelaksanaannya masih bersifat parsial atau belum terintegrasi.

Kenyataan di lapangan banyak terjadi over laping dalam pembinaan, pelatihan yang dilakukan oleh berbagai instansi. Terutama dalam hal pola

pembinaan, pelatihan belum memperhatikan aspek *supply* dan *demand*. Ada pihak yang melakukan pelatihan keterampilan dalam bidang produksi, namun tidak ada kelanjutannya. Akibatnya setelah para pengrajin memiliki keterampilan dan dapat meningkatkan produknya, mereka mendapatkan kesulitan dalam hal pemasaran produk/hasil. Hal tersebut merupakan akibat dari kurang adanya koordinasi antar instansi terkait.

Mulai tahun 2001 sebagai awal diterapkannya otonomi daerah diperlukan suatu bentuk pembinaan dari berbagai instansi secara terpadu (*integrated*) untuk seluruh jenis industri kecil potensial. Seluruh instansi pembina memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga koordinator. Seluruh instansi pembina perlu memiliki orientasi yang sama dalam menciptakan adanya keseimbangan antara produksi (*supply*) dengan pemasaran (*demands*). Adanya keseimbangan tersebut akan menghasilkan suatu situasi usaha yang kondusif, sehingga tidak menimbulkan persaingan usaha yang kurang sehat diantara para pengrajin.

Kendala lain yang dialami para pengrajin adalah adanya krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Dampak dari terpuruknya perekonomian tersebut telah banyak mengakibatkan para pengusaha pengrajin kulit sempat menghentikan kegiatan produksinya. Hal ini disebabkan karena harga bahan baku melonjak naik secara drastis namun volume penjualan terus menurun. Meskipun demikian, para pengrajin kulit tetap melakukan upaya dengan berbagai cara. Namun upaya tersebut belum mendapat hasil yang optimal karena keterbatasan sarana/peralatan permesinan serta permodalan yang dimiliki.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak pemerintah melalui Kantor Dinas PERINDAG Kabupaten Garut berupaya melakukan kegiatan pelatihan teknik produksi serta memberikan bantuan stimulan berupa sarana produksi. Pelatihan dan bantuan tersebut memiliki tujuan agar para pengrajin dapat melakukan diversifikasi produk untuk mendorong tercapainya nilai tambah yang lebih memadai. Demikian juga mampu menumbuhkan kembali semangat/motivasi para pengrajin dalam berusaha sehingga dapat meningkatkan produksinya.

Salah satu kawasan/sentra industri andalan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut saat ini adalah sentra industri barang kerajinan dari kulit. Sentra industri ini mempunyai peluang dan prospek yang sangat cerah untuk dikembangkan menjadi pusat produksi dan perdagangan barang kerajinan dari kulit yang terbesar di Indonesia, seperti halnya Kota Gede di Yogyakarta yang dikenal sebagai sentra barang kerajinan dari perak. Komitmen, kerja keras dan kerjasama dari semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, pemilik modal, pengelola, pengrajin maupun masyarakat Garut sendiri akan mampu mewujudkan cita-cita tersebut.

Faktor pendukung terwujudnya sentra industri ini diantaranya adalah, tersedianya bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Sumber bahan baku di Kabupaten Garut cukup banyak dengan lokasi yang strategis, berdekatan bahkan menyatu dalam lingkungan sentra industri kecil penyamakan kulit. Tersedianya bahan baku yang cukup banyak berupa kulit tersamak, telah memacu dan memotivasi kreativitas para pengrajin untuk memanfaatkan seoptimal mungkin melalui berbagai kegiatan yang lebih produktif serta



mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, baik bagi dirinya maupun masyarakat disekelilingnya.

Alternatif kegiatan yang dipilih adalah pembuatan berbagai barang kerajinan dari kulit, seperti jaket, sepatu, sandal, dompet, ikat pinggang, sarung tangan dan produk lainnya. Adanya permintaan terhadap jaket kulit yang terus meningkat dari daerah di luar Kabupaten Garut (pasaran lokal maupun nasional) seperti dari Bandung, Jakarta atau beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali maupun Sumatera telah mendorong pengrajin jaket kulit di Kabupaten Garut tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan pengrajin kulit di daerah-daerah lainnya.

Selain memenuhi permintaan konsumen lokal dan nasional, kerajinan jaket kulit dari Garut juga sudah merambah ke pasar di luar negeri. Sampai saat ini, jaket kulit Garut sudah diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Taiwan juga Jepang. Volume dan nilai ekspor jaket kulit Garut pada tahun 1999 mencapai 4.550 potong (2.250 kg) dengan senilai US \$ 240,814.50.

Kapasitas produksi dari sentra industri barang kerajinan kulit Kabupaten Garut untuk berbagai jenis barang kerajinan yang dihasilkannya tercatat sebanyak 550 unit usaha dengan perincian : 361 unit usaha pengrajin jaket kulit, 26 unit usaha pengrajin sepatu, 1 unit usaha pengrajin tas kulit, dan 162 unit usaha lainnya (dompet, sabuk, topi dan sebagainya). Penyebaran wilayah pengrajin kulit meliputi beberapa kecamatan dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.106 orang dengan total investasi sebesar Rp 2.161.235.000,- dan nilai produksi sebesar Rp 134.316.670.000,-.

Pelatihan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kemampuan pengrajin. Upaya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan industri kecil terutama di kecamatan Karangpawitan Garut. Adapun upaya dari pemerintah maupun masyarakat di dalam pengembangan SDM melalui pelatihan sedang dan terus dilaksanakan.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mencapai hasil secara optimal apabila memperhatikan dampak program yang diterapkan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil maupun dampaknya. Dengan pelatihan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengrajin serta dapat memenuhi tujuan program tersebut.

Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat melihat bahwa pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan pendapatan pengrajin kulit serta mampu membawa pengaruh yang lebih baik. Penelitian ini berjudul "Program pelatihan teknik produksi dalam pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit (suatu studi kasus di lingkungan industri kecil kecamatan Karangpawitan Garut).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang menyangkut kegiatan industri kecil pengrajin kulit sebagai berikut:

1. Diversifikasi produk belum dilakukan oleh para pengrajin, sehingga hasil produksi hanya terbatas pada salah satu jenis produk saja. Demikian juga



- dengan disain masih terbatas kepada disain yang sudah ada dengan pesan dari konsumen. Pengrajin belum mengembangkan suatu disain baru yang inovatif dan prospektif.
2. Kurang terintegrasinya kegiatan pembinaan dari berbagai instansi, karena setiap instansi masih mempertahankan ego masing-masing. Berbagai pelatihan masih dilakukan secara parsial (terpisah) dilihat dari segi proses antara satu tahap dengan tahap lainnya.
 3. Minimnya mesin/peralatan produksi yang dimiliki para pengrajin. Masih banyak pengrajin yang harus membayar biaya produksi untuk satu jenis pekerjaan tertentu kepada pengrajin yang lebih besar.
 4. Masih lemahnya penguasaan manajemen usaha sehingga keuntungan yang diperoleh tidak menjadi tambahan modal kerja, tetapi digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Missal ada kecenderungan untuk bersaing dalam membangun rumah tinggal yang cukup mewah dan aspek kehidupan lainnya.
 5. Jaringan pemasaran hasil produksi masih terbatas untuk daerah tertentu, dan belum bisa memperluas pasaran ke wilayah lain termasuk untuk kerajinan kulit belum terpusat pada satu wilayah, tapi masih tersebar pada beberapa wilayah. Hal ini kurang mendukung bagi kegiatan industri kerajinan kulit sebagai objek wisata bagi para turis baik domestik maupun asing.
 6. Belum tumbuhnya jiwa kooperatif diantara para pengrajin yang mengarah pada usaha kerjasama dalam suatu wadah. Hal ini juga yang menimbulkan

adanya persaingan yang kurang sehat diantara para pengrajin dalam melakukan pemasaran hasil produksi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu kepada identifikasi permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan rumusan permasalahan pokok penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah program pelatihan teknik produksi untuk pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit?”

Mengingat rumusan masalah penelitian tersebut masih luas, maka peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan program pelatihan teknik produksi untuk pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit ?
2. Bagaimana pelaksanaan program pelatihan teknik produksi untuk pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit ?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan program pelatihan teknik produksi untuk pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit ?
4. Bagaimana dampak pelaksanaan program pelatihan teknik produksi untuk pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit ?

D. Definisi Operasional

1. Program adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan dalam suatu tahun anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Garut.
2. Pelatihan teknik produksi adalah suatu proses kegiatan pemberian pengetahuan dan keterampilan yang meliputi pembuatan disain,

menggambar pola, teknik memotong/menjahit, menyambung kulit dan penyelesaian tahap akhir yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Garut.

Menurut Agus Darma (1994 : 15) pelatihan adalah aktifitas yang dilaksanakan pada tempat yang sesuai dengan program, serta memiliki tujuan yang jelas, metode pembelajaran yang spesifik, sasaran atau peserta yang jelas, rencana untuk mengimplementasikan, penilaian terhadap hasil, dan termasuk di dalamnya adalah belajar.

3. Pengembangan kewirausahaan adalah kemampuan para pengrajin dalam pengolahan bahan baku dan pengembangan model/disain produk yang lebih prospektif serta dapat meningkatkan penghasilan.
4. Pengrajin kulit adalah individu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang kerajinan yang terbuat dari kulit (jaket, sepatu, dan produk sejenis lainnya) yang berlokasi di kecamatan Karangpawitan kabupaten Garut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diangkat dari latar belakang, rumusan dan fokus penelitian, yaitu :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang program pelatihan teknik produksi bagi pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit di Karangpawitan Garut.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengungkapkan data tentang perencanaan program pelatihan teknik produksi untuk pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit ?
- b. Untuk mengungkapkan data tentang pelaksanaan program pelatihan teknik produksi untuk pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit ?
- c. Untuk menganalisis data tentang hasil pelaksanaan program pelatihan teknik produksi untuk pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit ?
- d. Untuk menganalisis data tentang dampak pelaksanaan program pelatihan teknik produksi untuk pengembangan kewirausahaan pengrajin kulit ?

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam mengadakan penelitian ini adalah

1. Menjadi masukan bagi pengembangan teori tentang proses pelatihan teknik produksi sebagai salah satu bentuk model pendidikan luar sekolah (PLS).
2. Menjadi masukan bagi pihak penyelenggara pelatihan teknik produksi yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian agar pelatihan tersebut mencapai tujuan pelatihan yang lebih optimal.
3. Menjadi masukan bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang sedang diteliti, serta penulis lain yang akan mengadakan studi lanjutan tentang pelatihan teknik produksi.

G. Kerangka Pemikiran

Kegiatan pelatihan merupakan salah satu bagian dari satuan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Untuk mengelola kegiatan pelatihan secara efektif dan efisien perlu memenuhi persyaratan-persyaratan khusus, memerlukan komponen-komponen tertentu, perlu proses pembelajaran, situasi dan pendekatan yang tepat. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi masukan mentah (*raw input*), masukan sarana (*instrumental input*), masukan lingkungan (*environmental input*), masukan lainnya (*others input*), proses (*process*), keluaran (*ouiput*) dan pengaruh (*impact*). (D. Sudjana, 1993: 2).

Untuk lebih jelasnya, rincian proses dalam pelatihan teknik produksi yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Input

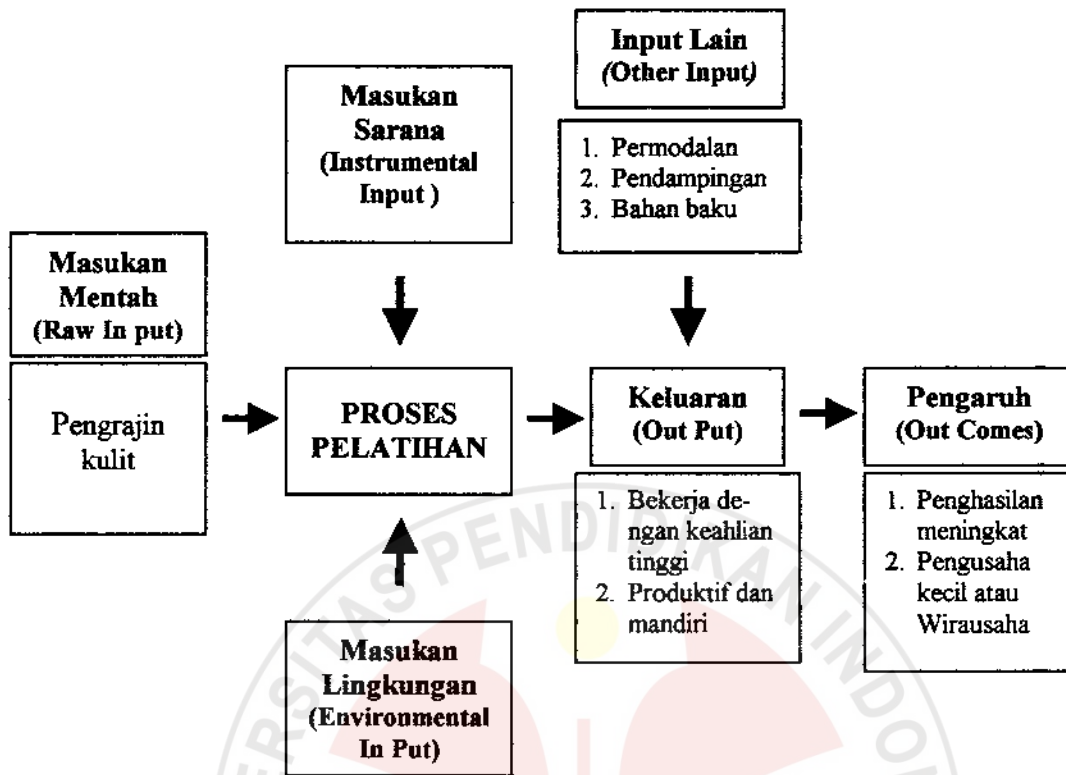
Sebagai masukan dalam pelatihan teknik produksi adalah warga belajar yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Berbadan sehat atau sedang tidak menderita sakit yang berat.
- b. Berstatus sebagai pengrajin Industri kecil kerajinan barang kulit.
- c. Bisa membaca dan menulis
- d. Pasih berbahasa Indonesia
- e. Bersedia mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir kegiatan.
- f. Bersedia mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan panitia.

2. Proses

Proses pelatihan teknik produksi di Karangpawitan Garut memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Materi pelatihan, yang diberikan secara garis besar ada 2 bagian, yaitu :
teori dan praktek, manajemen kewirausahaan di bidang kerajinan kulit.
 - b. Media pelatihan, menggunakan alat-alat mekanik dan alat dibuat sendiri
sesederhana mungkin tetapi fungsional dengan kebutuhan dalam proses
pelatihan.
 - c. Tempat belajar dan waktu, pelatihan dilaksanakan di balai kelurahan
Karangmulya kecamatan Karangpawitan kabupaten Garut. Proses
pelatihannya diatur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 5 kali
dalam seminggu.
 - d. Metode dan teknik pelatihan dalam proses pelatihan teknik produksi, warga
belajar memperoleh pendidikan manajemen kewirausahaan dengan
mengkombinasikan beberapa teknik pelatihan. Sedangkan teknik pelatihan
yang diutamakan adalah demonstrasi dan bimbingan langsung.
3. Output
- Yang menjadi output dalam pelatihan teknik produksi adalah warga belajar
yang memiliki kemampuan keterampilan di bidang teknik produksi, sehingga
memiliki kemampuan bekerja dengan keahlian tinggi atau menjadi pengusaha
atau wirausahawan kecil di bidang kerajinan kulit.
4. Outcome
- Dampak dari proses pelatihan teknik produksi tersebut adalah (1) warga
belajar memiliki kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan sendiri, (2)
warga belajar produktif dan mandiri, serta (3) Membelajarkan orang lain.



Gambar 1.1. : Kerangka Berpikir Proses Pelatihan Teknik Produk di Karangpawitan Garut